SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2023

OLEH :
Drs.MOCH,MACHFUD,M.M

KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan
Megilan

Gambaran umum Kecamatan Brondong

KECAMATAN BRONDONG MERUPAKAN BAGIAN WILAYAH LAMONGAN YANG TERLETAK DIBELAHAN UTARA,KURANG LEBIH 50 KM DARI IBU KOTA KABUPATEN LAMONGAN, BERADA PADA KOORDINAT ANTARA 06° 53' 30,81" – 7° 23'6" LINTANG SELATAS DAN 112° 17' 01,22" – 112° 33'12" BUJUR TIMUR, DENGAN BATAS-BATAS WILAYAH SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Utara	• Laut Jawa
Sebelah Timur	• Kec.Paciran
Sebelah Selatan	• Kec.Laren dan Kec.Solokuro
Sebelah Barat	• Kec.Palang Kab. Tuban

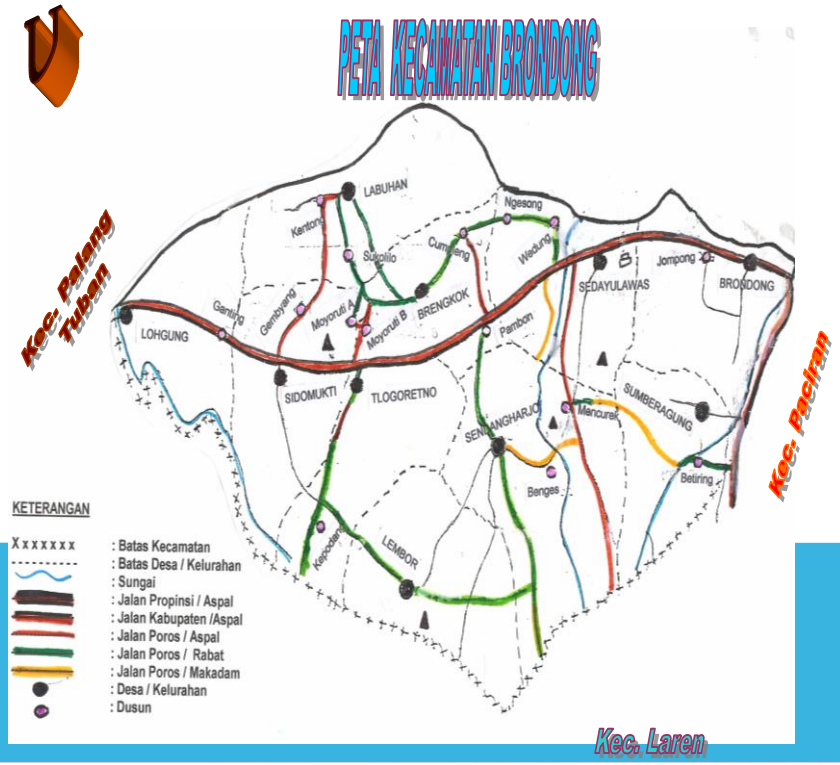

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati (Perbub Nomor 85 tahun 2020)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

FUNGSI

- Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan urnum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenterarnan dan ketertiban umum;
- Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
- Penyclcnggaraan koordinasi penyclenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan urusan pcmerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
- Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.
- Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

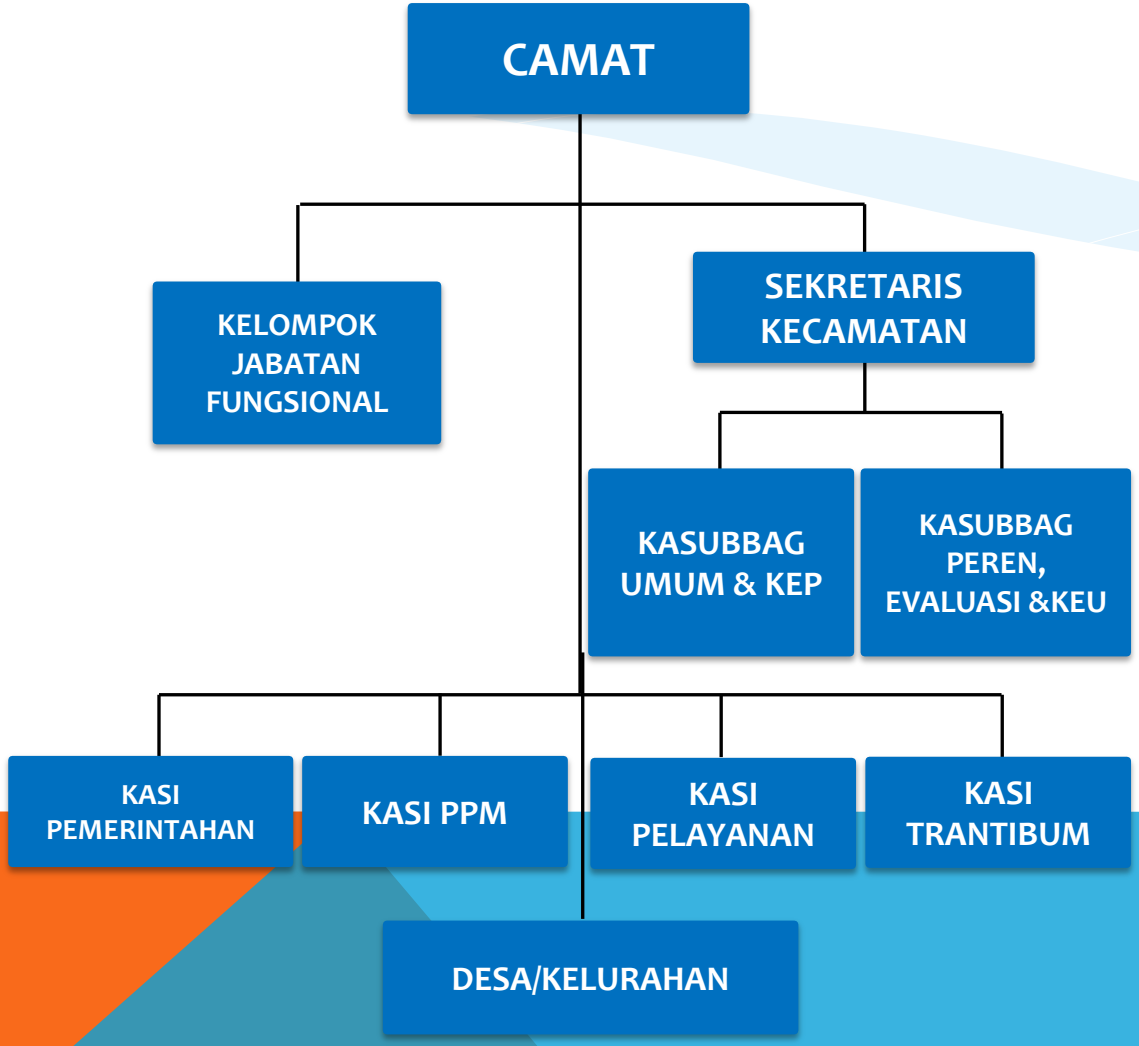

KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BRONDONG BERJUMLAH 20 ORANG, TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUS
- ✓ PNS/CPNS : 12
- ✓ NON ASN : 8

B. BERDASARKAN PENDIDIKAN
- ✓ SMP : 1 orang
- ✓ SMA : 8 orang
- ✓ D-3 : - orang
- ✓ S-1 : 8 orang
- ✓ S-2 : 3 orang

Lamongan Megilan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

VISI

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"

Misi 1.
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan mengoptimalkan berbagai potensi serta sektor unggulan, pengetahuan industry kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)

Misi 2.
Mencetak sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif, daya saing dan berakhlaqul karimah dalam rangka menyambut revolusi industry 4.0

Misi 3.
Membangun infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan

Misi 4.
Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang religious, berbudaya, aman, tentramdalamrelasi yang seimbang antara berbagai komponen dengan tidak meninggalkan kearifan local masyarakat dan stakeholder pembangunan

Misi 5.
Menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis digital dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

TUJUAN

1. **Meningkatkan Manajeman Internal Perangkat Daerah**
2. **Meingkatkan Kemandirian Desa**

SESUAIKAN RENSRA 2021-2026

PELAKSANAAN SAKIP

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET TAHUNAN					
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatkanya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	Nilai Interval SKM	86,11	87,15	87,25	87,50	87,75	88,00	88,00
	NILAI SAKIP Kecamatan	Penilaian Inspektorat	82,23	82,33	82,43	82,53	82,63	82,73	82,73
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	6 Desa	7 Desa	6 Desa	5 Desa	4 Desa	3 Desa	3 Desa
	Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan publik tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah pelayanan publik yang dilayani tepat waktu}}{\text{Jumlah Pelayanan publik yang dilayani}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROSES BISNIS

PROSES BISNIS

TUJUAN I
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR TUJUAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

SASARAN
MENINGKATKAN MANAJEMEN INTERNAL PERANGKAT DAERAH

MENINGKATKAN KUALITAS SDM

- Melaksanakan Bimtek Pelayanan Publik bagi Petugas Pelayanan Kecamatan Brondong.
- Melaksanakan Study Referensi Pelayanan Publik

PEMENUHAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

- Perbaikan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Publik
- Pengadaan Komputer , Kursi dan Meja kerja
- Peningkatan kualitas Jaringan IT yang mendukung kelancaran pelayanan publik

TERSEDIANYA MEKANISME PELAYANAN YANG BAIK

- Pelayanan Publik berdasarkan SOP Pelayanan
- Menjalin kerja sama dengan Pemerintahan Desa / Kelurahan dalam memperlancar pelayanan publik.
- Monitoring dan Evaluasi berjenjang oleh penanggungjawab pelayanan kepada Operator.

TUJUAN 2
MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA

INDIKATOR TUJUAN
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA

SASARAN
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DESA

PENINGKATAN KUALITAS SDM

- Melaksanakan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan.
- Melaksanakan Pembinaan Tertib Administrasi Desa / Kelurahan.
- Melaksanakan Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa / Keluirahan

PENINGKATAN KOORDINASI DENGAN DINAS INSTANSI, UPT, DAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

- Melaksanakan Rapat Koordinasi Dinas Instansi, UPT dan Kepala Desa / Lurah.
- Melaksanakan Musrenbang Des/ Kecamatan
- Melaksanakan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI DESA / KELURAHAN

- Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan.
- Lomba Desa / Kelurahan
- Penerapan siskeudes

PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

- Fasilitasi Sarana Prasarana Pemerintahan Desa / Kelurahan.
- Fasilitasi pengajuan Dana Pembangunan Desa pada Dinas Sektoral terkait
- Monev Pelaksanaan Pembangunan Desa / Kelurahan

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Fasilitasi Pertumbuhan, Perkembangan dan Pealtihan UMKM
- Fasilitasi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian di Desa / Kelurahan
- Fasilitasi Pertumbuhan dan Perkembangan BUMDES
- Fasilitasi Kemiskinan Desa / Kelurahan

Level Kinerja

POHON KINERJA

Kinerja Sasaran

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif
I K: IKM

Kinerja Urusan/ Sub Urusan

Meningkatkan Manajemen Internal PD
IK: Nilai SAKIP

Kinerja Taktikal

Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
IK: Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi** IK: Prosentase Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan
- Meningkatkan Kinerj Administrasi Keuangan IK: Prosentase Kinerja Keuangan
- Meningkatkan Administrasi Kepegawaian PD IK: Prosentase Kinerja Adm Kepegawaian
- Meningkatkan Administrasi Umum PD IK: Prosentase Adm Umum PD
- Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan PD IK: Prosentase Pengadaan
- Penyedia Jada Penunjang Jasa PD IK: Prosentase Jasa Penunjang Urusan PD
- Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah IK: Prosentase Penunjang urusan Pem Daerah

Kinerja Operasional

- 1. 1. Penyusunan Dokuemen Perencanaan 2,Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja Ikstisar SKPD 3, Evaluasi Kinerja PD IK: Prosentase Evaluasi Kinerja PD
- 1.Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN 2, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3,Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan Sem/akhir
- Pengadaan Pakaian Dinas berserta atributnya
- 1, Penyediaan Konponen Instalasi listrik 2, Penyediaan Jasa Peralatan 3, Penyediaan Bahan Logistis 4, Penyediaan Bacaan 5, Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan konsultasi
- Pengadaan Mebeler
- 1. Jasa Komunikasi 2, Jumalah Penyedian Servis Peralatan 3, Jumlah Jasa Perkantoran
- 1. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2. julmlah Pemeliharaan Gedung Perkantoran

Level Kinerja

POHON KINERJA

Kinerja Sasaran

Meningkatkan Kemandirian Desa

IK: Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri

Kinerja Urusan/ Sub Urusan

Meningkatkan Pemberdayaan Desa

IK: Jumlah Desa Maju

Kinerja Taktikal

Meningkatkannya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

IK: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu

Meningkatkannya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

IK: Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban

IK Prosentase Ketentraman dan Ketertiban

Meningkatkan Penyelenggaraaan Pemerintahan Umum

IK Prosentase Penyelenggaraaan Pemrintahan Umum

meingkatkannya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

IK: Persentase Desa Naik Kelas

Meningkatkannya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan

IK: Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan

Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

IK: Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa

Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

IK: Jumlah Kelurahan yang melakukan pemberdayaan

Kordinasi Penerapan Perundang undang

Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Meningkatkan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

IK: Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri

Kinerja Operasional

Peningkatan Pelayanan Prima

IK: Jumlah koordinasi

Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

IK: Jumlah Koordinasi

Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

IK: Persentase Tugas Pemerintahan Umum yang terlaksananya

Pembangunan Sarana dan Prasarana

IK: Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

IK: Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sinergitas TNI POLRI

Sinergitas Perangkat Daerah

Penanganan konflik sosial sesuai UU

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

IK: Jumlah Desa Menyusunan ABK

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

IK: Jumlah Desa Terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

IK: Jumlah desa yang terfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

IK: Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

CASCADING PERENCANAAN TUJUAN I

Lamongan Megilan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Tujuan RPJMD	Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajeman Pemerintahan hingga ke Desa
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Sasaran RPJMD	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif
Indikator Sasaran	Nilai IKM
Tujuan PD	Meningkatkan Pelayanan Publik
Indikator Tujuan	Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Strategis	Meningkat Manajamen Internal Perangkat Daerah
Indikator	Nilai Sakip Kecamatan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator	Prosentase Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6. Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jumlah Penyediaan Urusan PD	Prosentase Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya SKPD	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor gedung kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Pengadaan Mebeler	1. Penyediaai Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya
Indikator	1. Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi 2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	1. Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 2. Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun 3. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1. Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	1. Jumlah Intern Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2. Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi 3. Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi 4. Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan 5. Jumlah Sura/Kabar yang tersedia 6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	1. Jumlah Pengadaan Perlngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	1. Jumlah Jasa Komunikasi, Internet dan Listrik Kantor Kecamatan 2. Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	1. Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2. Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

CASCADING PERENCANAAN TUJUAN II

Lamongan Megilan — BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Tujuan RPJMD	Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajeman Pemerintahan hingga ke Desa
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Sasaran RPJMD	Meningkatkan Kemandirian Desa
Indikator Sasaran	Persentase Peningkatan Desa Mandiri
Tujuan PD	Meningkatkan Kemandirian Desa
Indikator Tujuan	Jumlah Desa Mandiri
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pemberdayaan Desa
Indikator	Jumlah Desa Maju

Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pemberdyaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Indikator	Prosentase capaian Layanan	1. Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Program Penanganan Konflik	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	1. Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	1, Koordinasi Kegiatan Pembeberdayaan Desa 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Rekomendais dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator	Jumlah CapaianJenis Pelayanan Pubik yang dilaksanakan	Prosentase Jumlah Keg Pemberdayaan Masy di Wilayah Kec	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase PenyelenggaraaUrusan Pemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3. Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan Desa 4. Fasilitasi PenyelnggaraanKetentraman dan Ketertiban Umum
Indikator	Jumlah CapaianJenis Pelayanan Pubik yang dilaksanakan	1. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 2. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3. Jumlah Pembinaan di Kelurahan Brondong	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan konflik	1. Jumlah Desa/Kelurahan di fasilitasi 2. Jumlah Desa di fasilitasi 3. Jumlah pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan 4. Jumlah Pembinaan Pengendalian Keamanan

CASCADING KINERJA

Lamongan Megilan — BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif)

Kepala Daerah → Camat → Sekretaris → Kepala Seksi/Sub bag → Staf

Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajeman Pemerintahan hingga ke Desa

Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Meningkat Manajamen Internal Perangkat Daerah

Indikator : Nilai Sakip Kecamatan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

INDIKATOR : Prosentase Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6. Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target 100%	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target 100%	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Target 100%	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah Target 100%	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target 100%	Prosentase Jumlah Penyediaan Urusan PD Target 100%	Prosentase Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Target 100%
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya SKPD	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor gedung kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Pengadaan Mebeler	1. Penyediaai Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya
1. Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi (Target 2 Dok) 2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Target 22 Lap) 3. Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Target 1 Dokumen)	1. Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Target 12 Lap) 2. Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun (Target 1 Lap) 3. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Target 2 Lap)	1. Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi (Target 22 Stell)	1. Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (target 10 Jenis) 2. Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi (Target 10 Unit) 3. Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi (Target 42 Jenis) 4. Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan (Target 11 Jenis) 5. Jumlah Sura/Kabar yang tersedia (Target 8 Jenis) 6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (Target 440 Nasi,Snack, Aiir)	1. Jumlah Pengadaan PerIngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi (Target 1 Paket)	1. Jumlah Jasa Komunikasi, Internet dan Listrik Kantor Kecamatan (Target 3 Rekening) 2. Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Target 3 Jenis) 3. Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan (Target 10 Orang)	1. Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Target 1 Mobil 6 Motor) 2. Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (target 3 Paket)

CASCADING KINERJA

Lamongan Megilan BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kepala Daerah

Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajeman Pemerintahan hingga ke Desa

Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Camat

Meningkatkan Kemandirian Desa

Jumlah Desa Maju

Sekretaris Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator
: Prosentase capaian Layanan

Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

INDIKATOR :
1. Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

INDIKATOR
Prosentase Program Penanganan Konflik

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

INDIKATOR
Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

INDIKATOR :
1. Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kepala Seksi

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan

INDIKATOR:
Jumlah Capaian Jenis Pelayanan Pubik yang dilaksanakan

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

INDIKATOR :
Prosentase Jumlah Keg Pemberdayaan Masy di Wilayah Kec

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Prosentase PenyelenggaraaUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Fasilitasi Rekomendais dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

INDIKATOR :
Prosentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan Pemdes

Staf

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator :
Jumlah Capaian Jenis Pelayanan Pubik yang dilaksanakan
Target : 3 Jenis Pelayanan

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

INDIKATOR :
1. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
Target : 3 Kegiatan
2. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Target 1 Paket)
3.Jumlah Pembinaan di Kelurahan Brondong (Target 1 Paket)
4, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Target 10 Desa/Kel

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan

Jumlah laporan konflik

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3. Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan Desa
4. Fasilitasi Penyelinggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR :
1. Jumlah Desa/Kelurahan di fasilitasi (Target 9 Ds 1 Kel)
2. Jumlah Desa di fasilitasi (Target 9 Desa)
3. Jumlah pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan (Target 3 Kegiiatan)
4. Jumlah Pembinaan Pengendalian Keamanan (Target 3 Keg)

MITIGASI RESIKO

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Sebab Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Brondong										
1	Penurunan Nilai SAKIP Kecamatan	RSO.23.99.39.01	-	Pelaporan Capaian Kinerja tidak akuntabel	Lambatnya Laporan Capaian Kinerja		Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Januari - Desember 2023	Januari – Desember 2023	Telah terealisasi
2	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaiakan	RSO.23.99.39.02	-	Kurangnya Komitmen Kepala Desa dalam membangun Desa	Tidak Ada Desa Naik Kelas		Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Januari - Desember 2023	Januari –Desember 2023	Telah terealisasi
Risiko Operasional OPD Kecamatan Brondong										
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu	ROO.23.99.39.01		Kurangnya Personil	Telat dalam penyusunan Perencanaan		Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari - Desember 2023	Januari – Desember 2023	Telah terealisasi
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan telat dilaksanakan	ROO.23.99.39.02		Kurangnya Personil	Gaji Tunjangan tidak terbayar		Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari - Desember 2023	Januari – Desember 2023	Telah terealisasi
3	Pengadministrasi Kepegawaian tidak tepat waktu	ROO.23.99.39.03		SDM Kurang Kompeten	tidak tertib pengadminitrasi Kepegawaian		Pembinaan dan Evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan	Januari - Desember 2023	Januari – Desember 2023	Telah terealisasi
4	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tidak terlaksana	ROO.23.99.39.06		Kurangnya Koordinasi antar Kecamatan dengan Instansi lain/Desa/Kelurahan	Penyelenggaraan Pemerintahan tidak terlaksana		Pembentukan Tim Kerja	Januari 2023	Januari 2023	Telah terealisasi
5	IKM tidak memenuhi target	ROO.23.99.39.07		Pelayanan tidak sesuai SOP	Masyarakat tidak puas akan pelayanan di Kecamatan Brondong		Mengembangkan Inovasi Pelayanan	Januari 2023	Januari 2023	Telah terealisasi
6	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak terlaksana	ROO.23.99.39.08		Kurangnya Personil	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak terlaksana		Roling Staf	Januari 2023	Januari 2023	Telah terealisasi
7	Pembangunan Fisik Kelurahan tidak terlaksana	ROO.23.99.39.09		Kurangnya Kompeten SDM Kelurahan	Kegiatan Pembangunan Fisik Kelurahan tidak dilaksanakan		Peningkatan Intensitas Pendampingan dalam pelasanaan perencaan pelaksanaan dan Evaluasi	Januari - Desember 2023	Januari – Desember 2023	Telah terealisasi
8	Pelaksanaan Keguatan PKK Kecamatan dan Desa tidak terlaksana	ROO.23.99.39.10		Kurangnya Personil	Pelaksanaan Keguatan PKK Kecamatan dan Desa tidak terlaksana		Pembinaan, Bimtek Anggota PKK Kecamatan dan Desa	Januari - Desember 2023	Januari – Desember 2023	Telah terealisasi
9	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Pearturan Kepala Daerah tidak berjalan	ROO.23.99.39.11		Kurangnya Koordinasi antar instasi	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Pearturan Kepala Daerah tidak terlaksana		Penunjukan Penjabat Pelaksana Seksi Trantibum	Januari - Desember 2023	Januari – Desember 2023	Telah terealisasi
10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	ROO.23.99.39.13		Kurangnya Personil	Pembinaan dan Pengawasan Desa kurang		Peningkatan Pembinaan Aparatur Desa	Januari - Desember 2023	Januari – Desember 2023	Telah terealisasi

PERJANJIAN KINERJA 2023

Eselon III A/Camat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs.MOCH.MACHFUD,M.M
Jabatan : Camat Brondong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.
Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Mei 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BUPATI LAMONGAN	CAMAT BRONDONG
Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.	Drs.MOCH.MACHFUD,M.M Pembina NIP. 19670414 199303 1 015

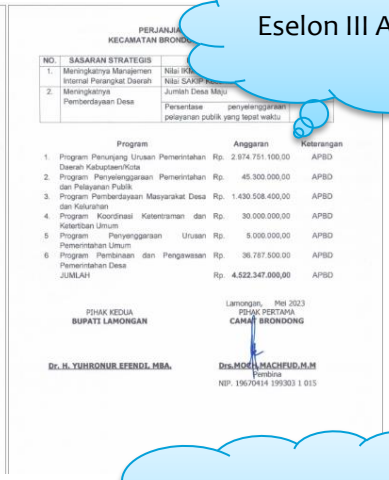

PERJANJI
KECAMATAN BRONDO

NO.	SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKU Nilai SAKIP
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.974.751.100,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	45.300.000,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	1.430.508.400,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	30.000.000,00	APBD
5	Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	5.000.000,00	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	36.787.500,00	APBD
	JUMLAH	Rp.	4.522.347.000,00	APBD

Lamongan, Mei 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BUPATI LAMONGAN	CAMAT BRONDONG
Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.	Drs.MOCH.MACHFUD,M.M Pembina NIP. 19670414 199303 1 015

Eselon III b/ sekcam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : NURUL KHUMAIDAH,SH.MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs.MOCH.MACHFUD,M.M
Jabatan : Camat Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brondong, 12 Mei 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
CAMAT BRONDONG	SEKRETARIS KECAMATAN BRONDONG
Drs.MOCH.MACHFUD,M.M Pembina NIP. 19670414 199303 1 015	NURUL KHUMAIDAH,SH.MM Penata Tingkat I NIP. 19710807 200112 2 002

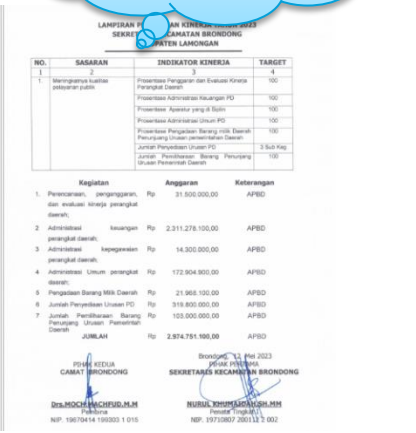

LAMPIRAN P AN KINERJA TAHUN 2023
SEKRE ECAMATAN BRONDONG
BUPATEN LAMONGAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase Penggunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
		Prosentase Administrasi Keuangan PD	100
		Prosentase Aparatur yang di Bolin	100
		Prosentase Administrasi Umum PD	100
		Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100
		Jumlah Penyediaan Urusan PD	3 Sub Keg
		Jumlah Pemiliharan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, pengangganan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;	Rp	31.500.000,00	APBD
2	Administrasi keuangan perangkat daerah;	Rp	2.311.278.100,00	APBD
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah;	Rp	14.300.000,00	APBD
4	Administrasi Umum perangkat daerah;	Rp	172.904.900,00	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp	21.968.100,00	APBD
6	Jumlah Penyediaan Urusan PD	Rp	319.800.000,00	APBD
7	Jumlah Pemiliharan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	103.000.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp	2.974.751.100,00	APBD

Brondong, 12 Mei 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
CAMAT BRONDONG	SEKRETARIS KECAMATAN BRONDONG
Drs.MOCH.MACHFUD,M.M Pembina NIP. 19670414 199303 1 015	NURUL KHUMAIDAH,SH.MM Penata Tingkat I NIP. 19710807 200112 2 002

Eselon IV a / Kasi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : MUJIANTO..SE,MM
Jabatan : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Brondong

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs.MOCH.MACHFUD,M.M
Jabatan : Camat Brondong

Selaku atasan PIHAK PERTAMA,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA akanmelakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brondong, 12 Mei 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BRONDONG	KASI PPM
Drs.MOCH.MACHFUD,M.M Pembina NIP. 19670414 199303 1 015	MUJIANTO..SE,MM Pembina NIP. 197409102003121004

KASI PEMB D DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunandi Desa	Jumlah Usulan Musrenbangdes	9 Desa
2	Peningkatan Efektitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	3 Kegiatan
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa di Fasilitasi	9 Desa/ 1 Kelurahan

NO	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp	7.250.000	APBD
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	15.000.000	APBD
3	Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp	10.000.000	APBD
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp	10.000.000	APBD
	Jumlah	Rp	42.250.000	APBD

Brondong, 12 Mei 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BRONDONG	KASI PPM
Drs.MOCH.MACHFUD,M.M Pembina NIP. 19670414 199303 1 015	MUJIANTO..SE,MM Pembina NIP. 197409102003121004

Staff

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
STAF KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : DWI RACHMAT WIJAYA, S.Sosio
Jabatan : Staf Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Brondong

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : MUHAMMAD RIANDOL,SE
Jabatan : Plh Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Brondong

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brondong, Januari 2022

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Plh. KASUBAG PERENCANAAN EVALUASI DAN KEUANGAN	
MUHAMMAD RIANDOL,SE Penata Tingkat I Nip. 19740420 200604 1 016	DWI RACHMAT WIJAYA, S.Sosio NIK.352407030494002

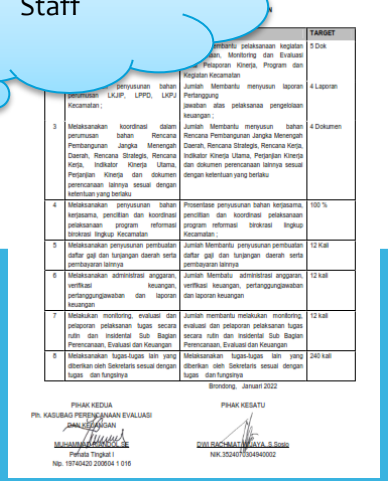

		TARGET
	membantu pelaksanaan kegiatan dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja, Program dan Kegiatan Kecamatan	5 Dok
	penyusunan bahan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; Jumlah Membantu menyusun laporan	4 Laporan
3	Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen
4	Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penciltian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan ;	100 %
5	Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya	12 Kali
6	Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan	12 kali
7	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	12 kali
8	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya	240 kali

Brondong, Januari 2022

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Plh. KASUBAG PERENCANAAN EVALUASI DAN KEUANGAN	
MUHAMMAD RIANDOL,SE Penata Tingkat I Nip. 19740420 200604 1 016	DWI RACHMAT WIJAYA, S.Sosio NIK.352407030494002

Monitoring Rencana Aksi Tribulan IV Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target I	Target II	Target III	Target IV	Realisasi I	Realisasi II	Realisasi III	Realisasi IV	Catatan Hasil Monitoring Rencana Aksi	Tindaklajut
1	Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	NILAI SAKIP				82,43					Nilai SAKIP dari Inspektorat belum keluar	
		Nilai IKM		87,25		87,25		82,22		82,26	Capaian Kinerja 100,02 % (Capaian Kinerja telah memenuhi Target Kinerja)	
2	Meningkatkanya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju		0		1		0	0	0	0 Jumlah Desa Maju, Karena 9 Desa telah naik status menjadi Desa Mandiri	
		Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian Kinerja telah memenuhi Target Kinerja	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN			SUB KEGIATAN									JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSAAN				Catatan Hasil Monitoring Rencana Aksi	Tindaklajut
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI I	REALISASI II	REALISASI III	REALISASI IV	AKSI	ANGGARAN	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%									3.136.243.000,00	√	√	√	√	√	√	√	√		
				1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras	100%	25%	25%	25%	25%	Penyusunan RKA, Renja dan DPA	26.380.000,00	√			√	√			√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	25%	25%	25%	25%	Rapat Koordinasi Kasi/Kasubag Staff	2.473.554.300,00	√	√	√	√	√	√	√	√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	-
				3. kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di sipilin	66 steel	0	0	44 Stel	22 Stel	Peningkatan disiplin SDM Aparatur Kecamatan	28.600.000,00				√				√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	-
				4. kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah	100	25%	25%	25%	25%	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dinas Instansi/Kepala Desa/Lurah	171.640.600,00	√	√	√	√	√	√	√	√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	-
				5. kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0	0	0	100	Melaksanakan Pengadaan Mebel guna peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	21.968.100,00				√				√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	
				6. kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Urusan PD	100	25%	25%	25%	25%	Melaksankan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.800.000,00	√	√	√	√	√	√	√	√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	-

				7. kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	50%	0	50	Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Guna Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	104,300,000.00	√	√	√	√	√	√	√	√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	-
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase capaian Layanan**	**100%**									**45,300,000.00**	√	√	√	√	√	√	√	√		
				1. kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Kemiskinan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	melaksanakan Rapat koordinasi Sinergi antar instansi	5,000,000.00	√	√	√	√	√	√	√	√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	-
				2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	6.000 Pelayanan, 87,25 IKM		Nilai IKM 82,22		Nilai IKM 82,26	Melakasanakan Monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelayanan Publik Kecamatan	40,300,000.00		√		√		√		√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**									**1,480,508,400**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**		
				1. kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan untuk pemberdayaan Masyarakat	20,508,400	√	√	√	√	√	√	√	√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	-
				2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan untuk pemberdayaan Masyarakat	10,000,000		√	√	√		√	√	√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	
				3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong	2 sub kegitan	2 sub kegitan	2 sub kegitan	2 sub kegitan	2 sub kegitan	Melakasanakan Monitoring evaluasi secara berkala terhadapKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,450,000,000		√	√	√		√	√	√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Program kordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100		**30,000,000.00**							**26,653,800.00**		√		√		√		√		

				1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah	5,000,000.00	100%	25	25	25	25	Melaksanakan Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah	5,000,000		√		√		√		√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	
				2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25,000,000.00	100%	25	25	25	25	Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	21,653,800		√		√		√		√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**		**5,000,000.00**							**5,000,000**		√		√		√		√		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah	5,000,000.00	100%	25	25	25	25	Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah	5,000,000		√		√		√		√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**									**34,385,700**	√	√	√	√	√	√	√	√		
				1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawsan Pemerintahan desa	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	9 desa 1 kelurahan	PeningkatanKuantitas dan Kualitas Pembinaan SDM Aparatur Desa/Kelurahan	34,385,700	√	√	√	√	√	√	√	√	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja	-
												4,728,090,900										

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Target	KINERJA						Catatan
					TR I	TR II	TR III	TR IV	Jumlah	%	
1	Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	Nilai Merupakan Akumulasi penilaian dari Komponen manajemen Kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja, Nilai SAKIP PD dikeluarkan Inspektorat	84,40							Nilai Belum keluar
2	Menigkatkan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju Kecamatan Brondong	1 Desa		**0**		**0**	**0**	**200 %**	• 9 Desa Mandiri • 0 Desa Maju • 0 Desa Berkembang

PK Eselon III A/Camat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs.MOCH.MACHFUD,M.M
Jabatan : Camat Brondong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.
Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Mei 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

PIHAK PERTAMA
CAMAT BRONDONG

Drs.MOCH.MACHFUD,M.M
Pembina
NIP. 196704141993031015

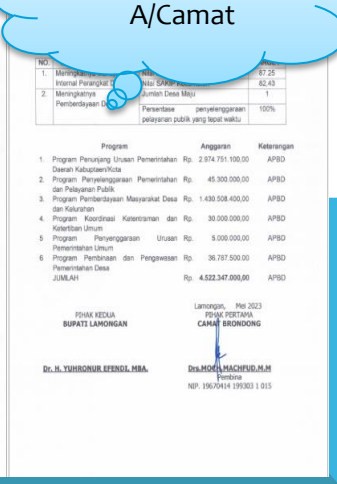

NO			
1.	Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat D	Nilai SAKIP	87,25 82,43
2.	Meningkatnya Pemberdayaan D	Jumlah Desa Maju	1
		Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.874.751.100,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 45.300.000,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.430.508.400,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 30.000.000,00	APBD
5	Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 5.000.000,00	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 36.787.500,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 4.522.347.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Lamongan, Mei 2023
PIHAK PERTAMA
CAMAT BRONDONG

Drs.MOCH.MACHFUD,M.M
Pembina
NIP. 196704141993031015

IKU

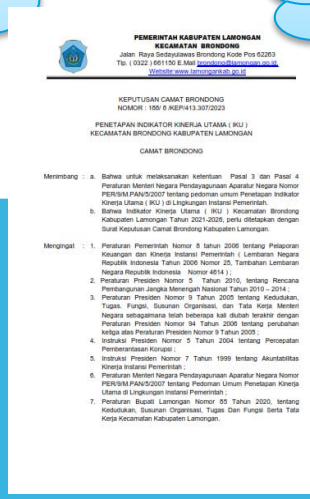

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG
Jalan Raya Sedayulawas Brondong Kode Pos 62263
Tlp. (0322) 661150 E.Mail brondong@lamongan.go.id
Website www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BRONDONG
NOMOR : 188/ 8.KEP/413.307/2023

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT BRONDONG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
b. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Brondong Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ;

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brondong
Pada tanggal : 3 Januari 2023

CAMAT BRONDONG

MUCHLIS, S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat I
196903241989031007

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan

RENJA 2023

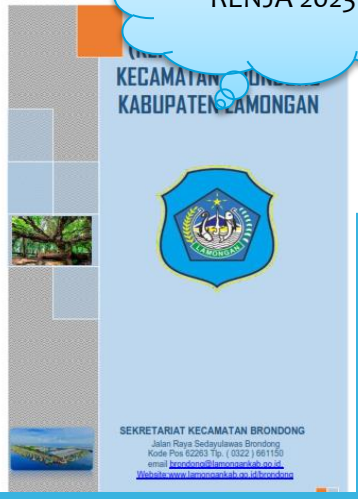

KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT KECAMATAN BRONDONG
Jalan Raya Sedayulawas Brondong
Kode Pos 62263 Tlp. (0322) 661150
email brondong@lamongankab.go.id
Website www.lamongankab.go.id/brondong

STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PENINGKATAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK MELALUI INOVASI DAN SINERGITAS, KOLABORASI ANTAR STAKE HOLDER

KUALITAS JENIS PERUBAHAN	BARU ADOPSI & MODIFIKASI
CAKUPAN MANFAAT	Output & outcome
KEJELASAN TAHAPAN (RENCANA AKSI)	Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
PEMETAAN STAKEHOLDER	Kuantitas & kualitas TIM inovasi Pelayanan Publik

Kreatifitas

LEARNING PRODUCT : KEBIJAKAN STRATEGIS → ORGANISASI BERKINERJA TINGGI

STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA

Kondisi :
1. **Kurangya Sumber daya Manusia / Aparatur Kecamatan Brondong**
2. **Sarana dan Prasarana penunjang kurang Representatif**

Permasalahan :
1. Kurangnya SDM Aparatur Kecamatan
2. Kondisi Sarana dan Prasarana kurang representatif

Sasaran Startegis 1 : Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Staretegi Pencapaian :
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan melalui layanan publik yang prima berbasis digital, inovatif serta Solutif

1. Pembaruan Inovasi Pelayanan
2. Update Inovasi Pelayanan **PEPES TAHU**
3. Bimtek Pembinaan Kualitas SDM Kecamatan
4. Pemeliharaan Gedung Kantor
5. Pengadaan Komputer, Tablet dan Printer untuk peningkatan kualitas pelayanan
6. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan berkala tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
7. Pengoptimalan Aktivasi IKD ke Pemohon sebagai solusi keterlambatan Blangko e KTP
8. Pemanfatan media sosial (whatsapps) sebagai sarana pelayanan online
9. Penambahan Ruang terbuka (Gazebo) sebagai penunjang Pelayanan Publik
10. Ruang Pelayanan Ramah ibu hamil dan anak

1. Nilai SAKIP (Belum di Keluarkan Inspektorat)
2. Survey Kepuasan Masyarakat Meningkat Out Put : Target 2023 IKM 85.25 Capaian 85.26 IKM

STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA

Kondisi : Jumlah Desa : 9 Desa
Jumlah Perangkat Desa Terisi : 95 Kosong : 6

Permasalahan :

1. Keterlambatan Penyelesaian Masalah bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Laporan Keuangan Administrasi Keuangan Desa
2. Perubahan Regulasi di Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sasaran Startegis 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Staretegi Pencapaian:
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koordinasi Dinas Instansi dan Desa serta Peningkatan Pengawasan, penyusunan perencanaan dan Evaluasi secara berkualitas serta Membangun Inovasi

1. Pembinaan Rutin Aparatur Perangkat Desa
2. Membangun Inovasi **"SIMPENAN CAMAT"** Sistem Penanggulangan Bencana Cermat dan Tepat
3. Kampung Tematik **"Pindang Megilan"**
4. Monitoring dan Evaluasi Secara berkala
5. Ajungan Desa
6. Peningkatan Rapat Koordinasi Baik di Kecamatan maupun di Desa secara Langsung

Hasil/ Out Put : Jumlah Desa Mandiri 9 Desa

Lamongan Megilan

PUBLIKASI DOKUMEN KINERJA DI WEBSITE WWW.LAMONGANKAB.GO.ID/BRONDONG

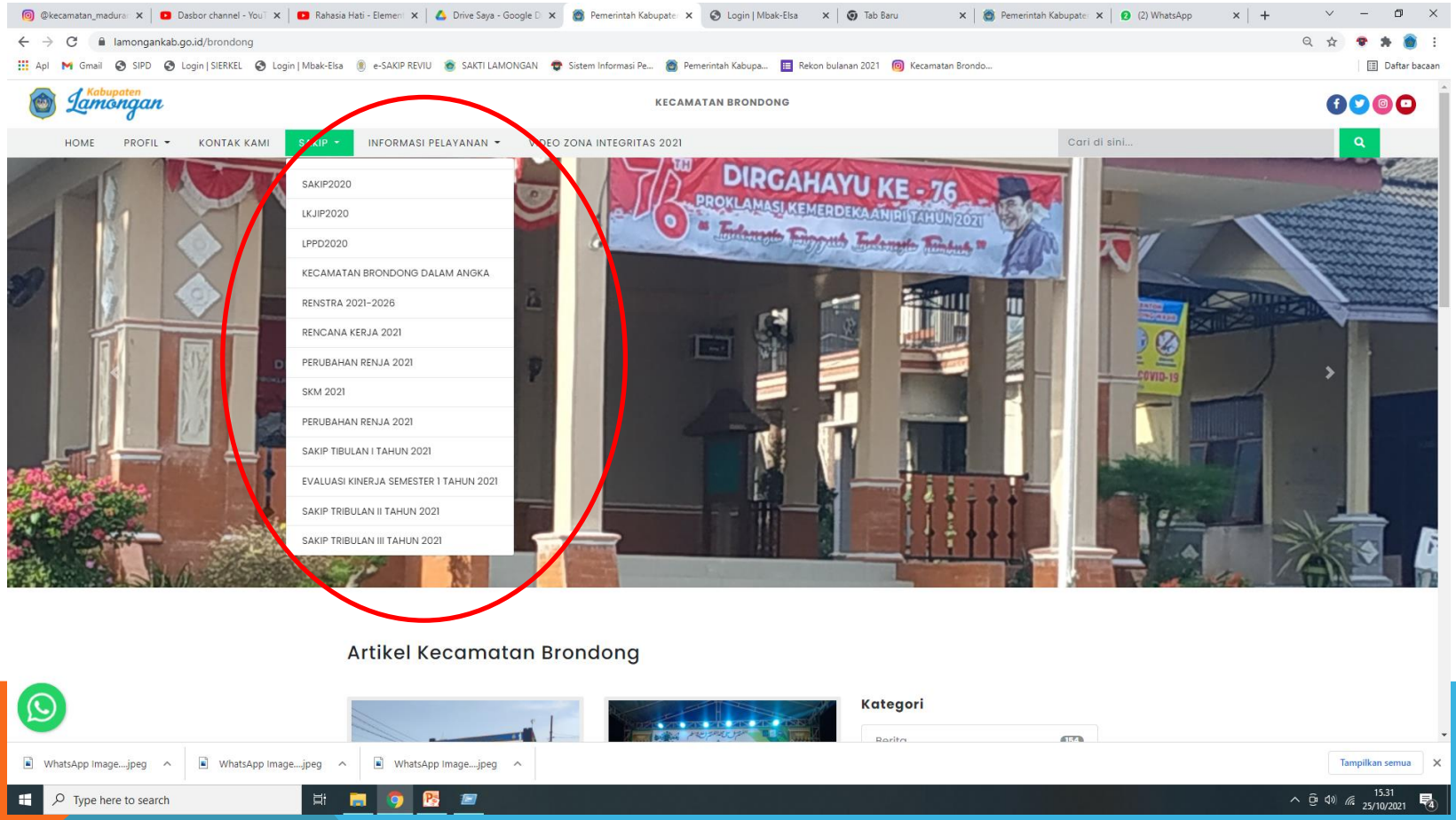

TERIMA KASIH